

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA OEPUAH UTARA KECAMATAN BIBOKI MOENLEU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Theresia Funay¹, Fidelis Atanus², Herminus Kefi³

¹Universitas Timor, Kefamenanu, funayressya@gmail.com

²Universitas Timor, Kefamenanu, atanusf@gmail.com

³Universitas Timor, Kefamenanu, herminus13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pencegahan *stunting* di Desa Oepuah Utara belum optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yaitu: 1. Belum adanya sosialisasi dari implementor kepada masyarakat sasaran terkait *stunting* dan program pencegahannya. 2. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Oepuah yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan banyak ibu hamil, bayi, balita yang kurang asupan gizi. 3. Pola asuh orang tua yang belum baik.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Pencegahan Stunting.*

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the implementation of the stunting prevention program in North Oepuah Village, Biboki Moenleu District, North Central Timor Regency. The research method used is descriptive qualitative. The research results show that the implementation of the stunting prevention program in North Oepuah Village is not optimal. This can be seen from several aspects, namely: 1. There has been no socialization from implementors to target communities regarding stunting and its prevention programs. 2. The economic conditions of the Oepuah Village community are not yet met, causing many pregnant women, babies and toddlers to lack nutritional intake. 3. Parental parenting patterns are not good.

Keywords: *Implementation, Stunting Prevention Program.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempersiapkan generasi emas 2045 yang di *Launching* oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2012 diproyeksikan sebagai hadiah 100 tahun kemerdekaan Indonesia, akan tetapi hal ini tidaklah mudah. Dikarenakan stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia lima tahun di Indonesia. Kondisi tersebut tentu menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045 dan harus segera dituntaskan masalahnya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting 2021. Stunting merupakan kekurangan gizi pada bayi di seribu (1.000) tahun pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.

Permasalahan gizi di Indonesia merupakan masalah yang perlu ditangani. Hal ini karena gizi mempunyai keadaan yang sangat luas dan penanganannya memerlukan keterlibatan lintas sektoral dan lintas program. Sama halnya seperti yang dikemukakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 secara tegas telah memberikan arah pembangunan pangan dan gizi dengan meningkatnya ketahanan pangan dan status kesehatan serta gizi masyarakat. Upaya untuk peningkatan tersebut memerlukan upaya lintas bidang (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015). Permasalahan gizi buruk atau stunting masih menjadi momok dalam pembangunan manusia di Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki masalah stunting cukup tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang di kutip dari Link: (<https://www.kemekopmk.go.id/pemerintah-siapkan-langkah-penanganan-stunting-di-provinsi-ntt>).

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menyebutkan, kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Timor Tengah Selatan (48,3%) dan menyusul Timor Tengah Utara (46,7%). Dengan kata lain, sebanyak 48 dari 100 anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 46 dari 100 anak. Oleh karena itu, pada tanggal 24 Juni 2021 dalam kegiatan rembuk stunting wujudkan generasi Timor Tengah Utara bebas stunting, Bupati Timor Tengah Utara menyampaikan bahwa langkah penting harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan berbagai kegiatan intervensi diarahkan kepada pencegahan dan penurunan stunting. Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara mengharapkan peran dari seluruh elemen, baik Pemerintah Daerah, DPRD, LSM,

Universitas Timor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat angka penurunan stunting harus dapat dicegah dan ditekan hingga dibawah target 14% sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Bulan Desember 2020 yang lalu seperti di kutip dari Link: (<https://ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/643-rembuk-stunting-wujudkan-generasi-generasi-timor-tengah-utara-bebas-stunting>).

Merujuk pada penerapan kebijakan program pencegahan stunting, peneliti berfokus pada data Balita Stunting yang ada di Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Data Balita stunting hasil aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada periode Februari 2022 di Desa Oepuah Utara dengan rincian sebagai berikut : Sasaran dan total Balita diukur berjumlah 186 orang Balita, sedangkan status gizi tinggi badan berdasarkan umur anak Balita yang sangat pendek berjumlah 5 orang Balita, Balita Pendek berjumlah 27 orang Balita, Balita Normal berjumlah 154 orang Balita, Balita Tinggi tidak ada dan Jumlah Stunting pada Balita berjumlah 32 orang Balita.

Upaya Pemerintah Desa dalam penerapan Program Pencegahan Stunting sesuai dengan Instruksi Bupati melalui Peraturan Bupati Nomor 150 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2021 dengan Nomor Registrasi Kabupaten Timor Tengah Utara 626, dengan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa dengan Peraturan Dasar Nomor 6 Tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Nomor Registrasi Kabupaten Timor Tengah Utara 836 mengeluarkan anggaran sebanyak Rp. 19.200.000 dengan rincian 32 Orang anak yang mengalami stunting mendapatkan bantuan perhari Rp. 15.000 selama 40 Hari yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Oepuah Utara dan Kader Posyandu. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Oepuah Utara berupa Pemberian Makanan Tambahan dan Obat-Obatan untuk 32 Orang anak yang terdampak stunting.

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Oepuah Utara, disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya hidup untuk lebih sehat, kurangnya penyampaian informasi mengenai program pencegahan stunting oleh pemerintah dan petugas kesehatan mengenai program pencegahan stunting pada masyarakat. Akibatnya jumlah stunting di Desa Oepuah Utara berjumlah 32 orang Balita. Dengan adanya masalah ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara?”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional di sebut *public policy*. Kata *Policy* secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani berarti negara-kota. Kata tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *policie* yang berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintahan. Pengertian Publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subyek, obyek dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subyek kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah dan dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan disebut obyek kebijakan yaitu masyarakat itu sendiri.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli tentang kebijakan publik. David Easton dalam Said Zainal Abidin (2012) menyebutkan “Kebijakan publik sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Definisi ini diperkuat oleh definisi Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals values and practices*) definisi ini menyiratkan pengertian bahwa kebijakan publik adalah proyeksi dari program-program yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan tertentu untuk dilaksanakan. Pengertian diatas dirincikan oleh Thomas R Dye dalam Riant Nugroho (2012:87) bahwa

segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh Pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Singkatnya kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Untuk melihat lebih jauh proses implementasi kebijakan, sebelumnya perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi kebijakan. Dalam kamus Webster seperti yang dikutip Abdul Wahab (2005:64) dirumuskan bahwa mengimplementasikan (*To Implement*) berarti *to provide the means for carrying out* ; (menyediakan sarana untuk menyelenggarakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Berdasarkan pandangan ini berarti kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif, atau Dekrit Presiden).

Persoalan lain dalam implementasi kebijakan adalah apa yang oleh Preesman dan Wildavsky (1973) disebut sebagai “Kompleksitas tindakan bersama”. Mengingat bahwa proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut berlangsung mulus tanpa hambatan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Berikut model Implementasi Kebijakan yang menjadi acuan bagi implementor dalam implementasi sebuah kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn Berbeda dengan Smith, Mazmanian dan Sabateir. Model Meter dan Horn (1975) yang menekankan proses implementasi kebijakan model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik diantaranya :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
- b. Karakteristik agen pelaksana atau implementor
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d. Kecendrungan pelaksana atau implementor

Tujuan Implementasi

Implementasi merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Seperti yang dikutip pada(<https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/>). Mengacu pada pengertian implementasi yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa tujuan implementasi diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi ialah untuk melaksanakan rencana yang telah atau sudah disusun dengan cermat, baik itu juga oleh individu atau juga kelompok.

2. Untuk dapat menguji serta juga mendokumentasikan suatu prosedur di dalam penerapan rencana atau juga kebijakan.
3. Untuk dapat mewujudkan tujuan- tujuan yang hendak akan dicapai di dalam perencanaan atau juga kebijakan yang telah atau sudah dirancang.
4. Untuk dapat mengetahui kemampuan masyarakat di dalam menerapkan suatu kebijakan atau juga rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah/sudah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Berdasarkan tujuan implementasi yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam penerapannya agar tepat pada sasaran sesuai dengan program yang diharapkan oleh para pemangku kebijakan.

Pengertian Stunting

Stunting merupakan istilah para nutrinsis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai ukuran yang semestinya (bayi pendek). Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak- anak lain seusianya (MCN, 2009).

Stunting adalah tinggi badan yang kurang menurut umur ($<-2SD$ seperti saat balita berumur satu tahun sebelas bulan dengan berat badan 8,8 kg dan tinggi badan 77 cm, ciri-ciri ini menunjukkan bahwa bayi tersebut mengalami status kurang gizi atau tergolong balita sangat pendek). Juga ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Ini adalah indikator kesehatan anak yang kekurangan gizi kronis yang memberikan gambaran gizi pada masa lalu dan yang dipengaruhi lingkungan dan keadaan sosial ekonomi.

Kebijakan Pencegahan Stunting

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan pangan dan gizi. Selanjutnya Instruksi Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi dengan dasar regulasi pemberlakuan :

1. Strategi Percepatan penurunan Stunting
2. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota
3. Pedoman Penandaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Percepatan Penurunan Stunting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Fokus penelitian ini meliputi : Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana atau Implementor, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, Kecenderungan Pelaksana atau Implementor. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman dalam Rohidi (2007:20)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam bentuk deskriptif analisis. Dalam menganalisa hasil dari penelitian, peneliti menginterpretasikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa *informan* tentang Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan sub fokus penelitian: Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana atau Implementor, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, Kecenderungan Pelaksana atau Implementor.

Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi

Menurut Wibawa, (2004:20) Organisasi atasan atau (*Superior*) mestinya mampu mengkoordinasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan. Sesuai pada hasil penelitian tentang aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi kepada para informen, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa dan petugas kesehatan dalam program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara sudah sesuai dengan misi pada poin 1 tentang Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tertuang pada Rencana Jangka Menengah Desa Oepuah Utara Tahun 2019-2025.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini akan membentuk atasan mendorong bawahan sebagai pelaksana untuk bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan. Adapun aspek pelaksanaan dengan menunjuk kepada perbedaan antara kekuasaan normatif, renumeratif dan kekuasaan koersif (Winarno, 2004 : 112-114). Sesuai dengan jawaban para informen aktivitas implementasi program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas kesehatan melakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada masyarakat yang terdampak stunting. Namun ada masyarakat yang belum memahami informasi terkait stunting

di Desa Oepuah Utara. Seharusnya pemerintah desa dan petugas kesehatan atau lembaga yang terkait dengan program pencegahan stunting harus secara menyeluruh memberikan informasi terkait program pencegahan stunting.

Karakteristik Agen Pelaksanaan atau Implementor

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Winarno 2004:116). menyatakan bahwa karakteristik dari badan pelaksanaan dilihat dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang yang terjadi pada badan eksekutif baik hubungan potensial maupun hubungan nyata dengan apa yang mereka miliki dalam kebijakan. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

Sesuai pada hasil penelitian terkait dengan wawancara diatas tentang Karakteristik Agen pelaksanaan atau Implementor kepada para informen, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa dan petugas kesehatan dalam program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara sudah baik dengan memberikan perhatian khusus kepada Remaja, Bayi/Balita dan Ibu Hamil di Desa Oepuah Utara dengan mengalokasikan dana desa berupa bantuan makanan tambahan serta tablet penambah darah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak stunting.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa (1994:21), kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya diidentifikasi dan diambil inferensi logis dari bagian sistem kebijakan si depan kondisi, sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan.

Pada hasil penelitian sesuai dengan wawancara diatas tentang Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik kepada para informen, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa dan petugas kesehatan dalam program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara belum maksimal. Walaupun sudah ada perhatian khusus pemerintah desa dengan mengalokasikan dana desa untuk bantuan belanja perlengkapan dan memfasilitasi alat kesehatan di Puskesmas Kaubele. Hal ini dikarenakan ada masyarakat yang terdampak stunting belum puas dengan pelayanan yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang sosial dan bidang ekonomi di Desa Oepuah Utara.

Kecenderungan Pelaksana atau Implementor

Wujud respon individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasilnya dan tidaknya implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan maka implementasi tidak akan efektif. Hal yang sama juga terjadi "loyalitas" pelaksana kepada organisasi

rendah (Wibawa, 1994:21-22).

Sesuai dengan hasil penelitian tentang Kecenderungan Pelaksana atau implementor kepada para informen, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa dan petugas kesehatan dalam program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara belum berjalan dengan baik. Meskipun segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terlibat dengan pemberian bantuan sesuai arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun sejauh ini belum ada kepuasan yang dirasakan masyarakat dalam rangka membantu kesejahteraan hidupnya untuk hidup sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aktivitas Implementasi Dan Komunikasi Antar Organisasi, sesuai hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa dan petugas kesehatan dalam program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara sudah sesuai dengan misi pada poin 1 tentang Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tertuang pada Rencana Jangka Menengah Desa Oepuah Utara Tahun 2019-2025.

Implementasi program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas kesehatan melakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada masyarakat yang terdampak stunting. Namun ada masyarakat yang belum memahami informasi terkait stunting di Desa Oepuah Utara. Seharusnya pemerintah desa dan petugas kesehatan atau lembaga yang terkait dengan program pencegahan stunting harus secara menyeluruh memberikan informasi terkait program pencegahan stunting.

2. Karakteristik Agen pelaksanaan atau Implementor, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa dan petugas kesehatan dalam program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara sudah baik dengan memberikan perhatian khusus kepada Remaja, Bayi/Balita dan Ibu Hamil di Desa Oepuah Utara dengan mengalokasikan dana desa berupa bantuan makanan tambahan serta tablet penambah darah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak stunting.
3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik kepada para informen, peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa

dan petugas kesehatan dalam program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara belum maksimal. Walaupun sudah ada perhatian khusus pemerintah desa dengan mengalokasikan dana desa untuk bantuan belanja perlengkapan dan memfasilitasi alat kesehatan di Puskesmas Kaubele. Hal ini dikarenakan ada masyarakat yang terdampak stunting belum puas dengan pelayanan yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang sosial dan bidang ekonomi di Desa Oepuah Utara.

4. Kecenderungan Pelaksana atau Implementor, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa dan petugas kesehatan dalam program pencegahan stunting di Desa Oepuah Utara belum berjalan dengan baik. Meskipun segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terlibat dengan pemberian bantuan sesuai arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun sejauh ini belum ada kepuasan yang dirasakan masyarakat dalam rangka membantu kesejahteraan hidupnya untuk hidup sehat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengenai Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, Pemerintah Desa Oepuah Utara dan Petugas Kesehatan di Puskesmas Kaubele diharapkan agar secara menyeluruh menyampaikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai program pencegahan stunting agar masyarakat di Desa Oepuah Utara semuanya bisa memahami arti hidup sehat.
2. Mengenai Karakteristik Agen Pelaksanaan atau Implementor, Pemerintah Desa Oepuah Utara dan Petugas Kesehatan di Puskesmas Kaubele diharapkan agar lebih mendetil mendata masyarakat yang terdampak stunting agar dalam menjalankan program pencegahan stunting masalahnya bisa teratasi dalam lingkungan hidup masyarakat di Desa Oepuah Utara
3. Mengenai Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, Pemerintah Desa Oepuah Utara dan Petugas Kesehatan di Puskesmas Kaubele diharapkan agar banyak membantu masyarakat Desa Oepuah Utara secara menyeluruh bagi kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya.

4. Mengenai Kecenderungan Pelaksana atau Implementor, Pemerintah Desa Oepuah Utara dan Petugas Kesehatan di Puskesmas Kaubele diharapkan agar lebih memahami arah kebijakan dari adanya program pencegahan stunting ini untuk mewujudkan kesuksesan dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Bumi aksara. Jakarta.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arifin Tahir, 2014. *Kebijakan Publik dan Tansparansi Penyelenggaraan Pemeritah Derah*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Fikawati S, Stafiq A, Veratamala A. 2017. *Gizi Anak dan Remaja*. Depok: Rajawali Pers.
- Miles, Mathew B dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep
- Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press (UI-PRESS), 2007. Jakarta.
- Mukti AG, 2008. *Kesehatan Masyarakat*

- Administrasi dan Praktik. Penerbit buku kedokteran Jakarta.
- Mulyati T, Paryanto AP, Sudargo T, 2004. Pengaruh Pendidikan Gizi Terhadap Ibu Kepada Konsumsi Makanan dan Status Gizi Anak Balita. *Jurnal gizi klinik Indonesia* Yogyakarta.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Medika.
- Oxorn, Harry dan William R. Forte. 2010. *Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi*. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica.
- Probhoyekti, Dhian. 2020. *Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2025*. Kementerian kesehatan republik indonesia.
- Riant Nugroho, 2012. *Public Policy*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Said, Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Suhardjo. (2006). *Pangan, Gizi dan Pertanian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tachjan H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, APII Bandung PUSLT KP2W LMLIT UNPAD.
- Wibawa, Samodra, Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- <http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/5973/2874>
- Instruksi Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi dengan Dasar Regulasi Pemberlakuan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak akibat Penyakit.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang menegaskan tentang Penyusunan Rencana Aksi Nasional pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD- PG).
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Oepuah Utara Tahun 2019-2025.
- <https://ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/643-rembuk-stunting->

wujudkan-generasi-generasi-timor-tengah-utara-bebas-stunting. Diakses pada tanggal 09 Juni 2022, pada Pukul 09:45 WITA).
<https://www.kemekopmk.go.id/pe-merintah-siapkan-langkah-penanganan-stunting-di-provinsi-ntt>. Diakses pada Tanggal 09 Juni 2022, Pada Pukul 09:22 WITA).
<https://kominfo.jatimprov.go.id/rea-d/umum/kepala-bkkbn-indikator-penurunan-stunting-jadi-salah->

salu-parameter-keberhasilan-kepala-daerah. Diakses pada Tanggal 09 Juni 2022, Pada Pukul 08:21 WITA).
<https://pendidikan.co.id/implement-asi-adalah/>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2022 Pukul 15:32 WITA).
<https://pengertianaja.blogspot.com/2018/02/pengertian-dokumen-menurut-para-ahli.html?m=1> . Diakses tanggal 15 Juni 2022, pada pukul 11:24 WITA).